

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ali, 2015, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pramedia Group, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2010, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 2014, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1989, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bedner, Adriaan W., 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah studi sosio-legal*, HuMa, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cahya Indra Permana, Tri, 2016, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Genta Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendie Lotulung, Paulus, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa*, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HS, Salim, Septiana Nurbani, Erlis, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Huijabers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lemek, Jeremias, 2007, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia)*, Galangpress, Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin, Hamzah, Andi, 1993, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dari Beberapa Sudut Pandang*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Marbun, SF., MD, Moh. Mahfud, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

- _____, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marwan, M., P, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publiser, Surabaya.
- Mawardi, Irvan, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokrasi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, cetakan ke-5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Seri Hukum Administrasi Negara Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Pompe, Sibastiaan, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung; The Indonesian Supreme Court A Study of Institutional Collapse*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, Tjandra, Riawan, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konsititusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Wido Haruni, 2016, *Hukum Administrasi Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.
- Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, Hastuti Puspitasari, Sri, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Suryono, Hassan, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara (HTUN)*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- SW, Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan melalui PTUN*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- _____, 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triwulan, Titik, Gunardi Widodo, Ismu, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8);
- Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2918 Nomor 1586).

Internet

- Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, “Statistik Perkara Tata Usaha Negara”,
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1463&Itemid=882, diakses 18 Juli 2018

- Christopel Paino, “Tolak Sawit, Petani Banggai ditangkap” <http://www.mongabay.co.id/2013/11/30/tolak-sawit-petani-banggai-ditangkapi/>, diakses 6 Juni 2018
- Christopel Paino, “Sawit di Banggai, dari Penyerobotan Lahan sampai Ekspansi di Cagar Alam” <http://www.mongabay.co.id/2013/11/12/sawit-di-banggai-dari-penyerobotan-lahan-sampai-ekspansi-di-cagar-alam/>, diakses 6 Juni 2018
- Judiciary Of England and Wales, The Queen’s Bench Guide 2018, “A guide to the working practices of the Queen’s Bench Division within the Royal Courts of Justice”, hlm. 11. <https://www.gov.uk/government/publications/queens-bench-guide>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.
- LeIP, “Statistik Data Perkara Mahkamah Agung”, <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, diakses 18 Juli 2018
- <https://ptun-palu.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses tanggal 20 Desember 2018
- PTUN Palu, “Wilayah Hukum PTUN Palu”, <https://ptun-palu.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses 25 April 2019
- PTUN Palembang, “Alamat PTUN Se Indonesia”, <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia>, diakses 23 April 2019
- PTUN Gorontalo, “PTUN Provinsi Gorontalo Segera Beroperasi”, <https://humas.gorontaloprov.go.id/ptun-provinsi-gorontalo-segera-beroperasi/>, diakses tanggal 31 Juli 2019
- <http://portalbangkep.com/sawit-agrodeco-masalah-baru-agraria-di-bangkep/>, diakses tanggal 20 Mei 2019
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/ptun-palu/periode/register>, diakses tanggal 13 Juli 2019
- <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, dikutip juga dalam drive online
- <https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=E975B684D5F65350!11680&authkey=!AMIZCguqaOhm1n0>, diakses tanggal 13 Juli 2019
- http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1463&Itemid=882, diakses tanggal 13 Juli 2019
- Norman Edwin Elnizar, “Pemerintah Sediakan 53 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Marginal 2019-2021”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1f5c33123bb3929/pemerintah-sediakan-53-miliar-untuk-bantuan-hukum-masyarakat-marginal-2019-2021/>, diakses 14 Juli 2019

Artikel, Jurnal dan Makalah

- Agus Raharjo, Rahadi Wasi Bintaro, “Access to Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan”, Unisbank Semarang, 2016.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin”, *Arena Hukum*, Volume 9, No. 2, 2016.
- Riri Nazriyah, “Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 20, 2002.

J. Djohansjah, “Akses Menuju Keadilan (*Access to Justice*)”, *Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, Bandung, 30 Juni-3 Juli 2010. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2018, diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Buku lain

Black's Law Dictionary, Eighth Edition.